

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan masyarakat memerlukan kecerdasan sosial sebagai dasar pengetahuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini kecerdasan sosial terintegrasi dengan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter di antaranya berketuhanan yang Mahaesa, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan, demokratis, menjunjung tinggi hukum, dan hak asasi manusia, serta mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umat (Budimansyah, 2010).

Pendidikan karakter merupakan pondasi yang sangat penting dalam proses nilai pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Salim (2018, hlm. 119) bahwa “Pendidikan karakter merupakan suatu nilai usaha yang sangat serius dalam memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk dirinya sendiri secara pribadi maupun semua warga masyarakat secara keseluruhan”. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat menjadi suatu nilai yang dapat meningkatkan kecerdasan kewargaan.

Kecerdasan kewargaan bersesuaian dengan pembukaan UUD 1945 terutama untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini bermakna perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini tujuan negara diwujudkan dengan perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemudian, ditegaskan juga bahwa kecerdasan kewargaan sejalan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 (Hidayah et al., 2020, hlm. 3784).

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat Indonesia mengembangkan kecerdasannya sebagai warga negara yang aktif dengan didasari pengembangan kerjasama yang berkelanjutan. Kecerdasan kewargaan adalah kemampuan orang-orang yang bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama (Schuler, 2013, hlm. 46). Selain itu, kecerdasan kewargaan yang berkembang harus menekankan nilai-nilai yang mendukung perbaikan sosial dan lingkungan dengan mengakui dan menghormati peluang pragmatis dan tantangan khusus (Doug Schuler, 2005,

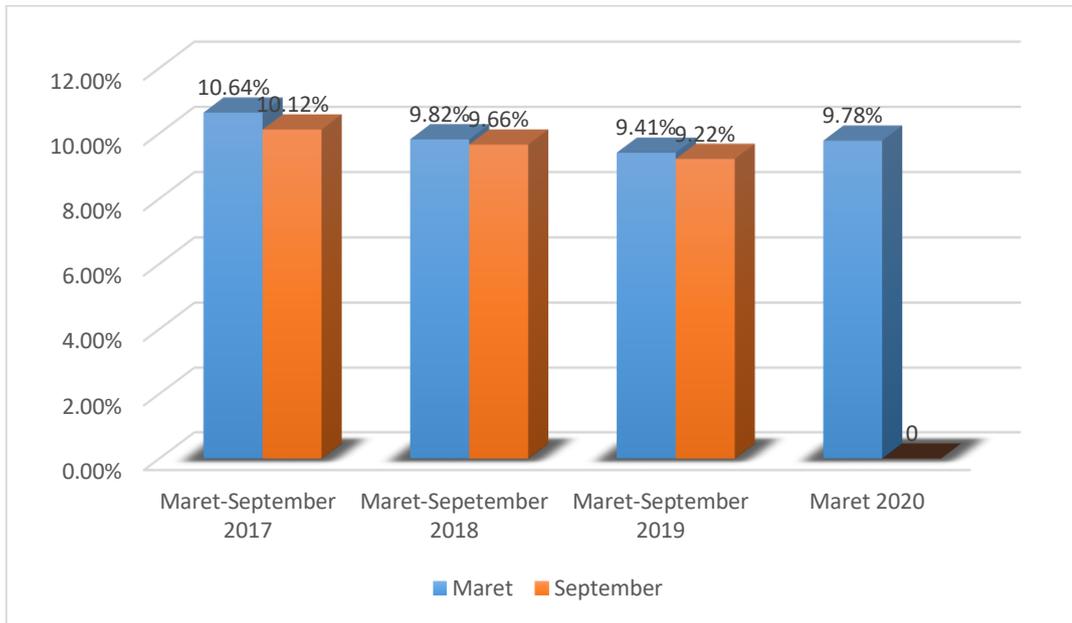
hlm. 169). Oleh karena itu, dalam mewujudkan negara Indonesia dilakukan kerjasama untuk perbaikan sosial.

Permasalahan saat ini, pandemi *covid-19* telah menyebabkan kerentanan terhadap beberapa kelompok penduduk yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan angka kemiskinan. Maekelae (dalam Gander & Wagner, 2021, hlm. 2) menjelaskan gelombang pertama penyakit *covid-19* dan pembatasan terkait yang ditetapkan oleh sebagian besar pemerintah seluruh dunia menyebabkan perubahan yang besar. Berdasarkan analisis, penyebaran wabah virus *covid-19* mengubah pranata sosial. Salah satu di antaranya yaitu meningkatkan risiko seseorang atau kelompok menjadi golongan miskin. Hal tersebut terjadi karena hilangnya pendapatan seseorang sehingga menurunkan tingkat produktivitas. Seperti halnya kematian pascabencana terutama pada seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga yang menyebabkan keluarganya masuk dalam kelompok miskin. Bencana tersebut dapat meningkatkan jumlah keluarga menjadi miskin secara cepat di daerah yang mengalami bencana tersebut. Perubahan pranata sosial lain yang dirasakan oleh masyarakat yaitu penurunan aktivitas ekonomi perdagangan dan peningkatan jumlah pengangguran karena pemutusan karyawan secara massal dalam perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Andriadi (2016) yang mengungkapkan bahwa penelitian *Benton Foundation* dan *Nasional Urban League* tahun 1998 menyampaikan simpulan laporan penelitian bahwa revolusi digital telah memperparah masalah kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa warga negara yang tidak dapat mengikuti arus globalisasi dalam revolusi digital adalah mereka yang kurang beradaptasi terhadap revolusi baru. Selain itu, Dewan Australia menggambarkan dampak *covid-19* pada komunitas seni sebagai bencana, pada April 2020, dilaporkan hilangnya \$330 juta dari pekerjaan dan lebih dari setengah sekitar 73% dari semua bisnis seni juga rekreasi telah berhenti beroperasi, serta sekitar 470.000 pekerja di Australia untuk seluruh sektor seni dan hiburan pun terdampak (Wearing et al., 2021, hlm. 44).

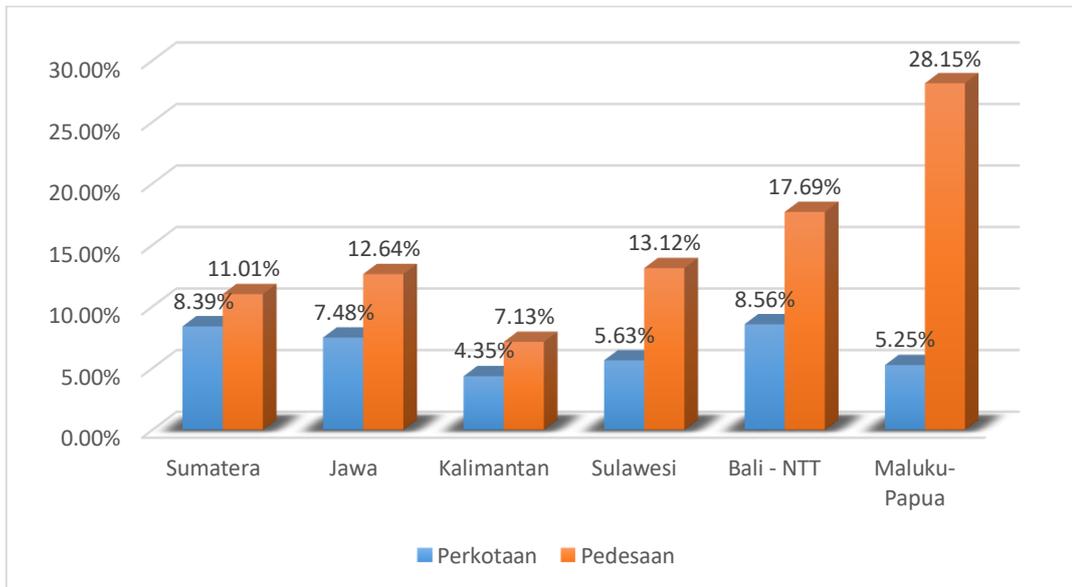
Untuk memperkuat pernyataan di atas, peneliti memanfaatkan data Badan Pusat Statistik. Saat ini, Kementerian Sosial menunjukkan kondisi perolehan angka persentase penduduk miskin dari berbagai pulau pada 2017-2020. Persentase tersebut disajikan dalam tabel 1. 1.

Tabel 1. 1  
 Persentase Penduduk Miskin



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Tabel 1. 2  
 Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Pulau



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan tabel persentase di atas menunjukkan kemiskinan di Indonesia berada di bawah satu digit, yaitu 9,22% pada 2019 atau menurun sebesar 0,44% dari 2018. Penurunan jumlah penduduk miskin pada saat ini menjadi 24,79 juta jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan dari penduduk miskin sebanyak 0,89 juta penduduk. Kemudian dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4,93% atau setara dengan 7 juta penduduk miskin. Jika berdasarkan kewilayahan, kondisi kemiskinan di perkotaan lebih rendah dibandingkan kemiskinan di pedesaan pada tahun 2019. Kemiskinan di perkotaan mencapai angka 6,56%, sedangkan di pedesaan mencapai 12,60% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia (Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024). Namun, kondisi pandemi yang berlangsung sampai tahun berikutnya menyebabkan angka kemiskinan menunjukkan persentase yang meningkat di tahun 2020 menjadi 9,78% atau setara dengan 26,42 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia. Pulau Jawa adalah peringkat ketiga dengan persentase penduduk miskin pedesaan terendah dengan perolehan persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 12,64% sedangkan di perkotaan sebesar 7,48%.

Analisis data di atas menunjukkan perlu adanya kesadaran dan partisipasi warga negara untuk meningkatkan pemberdayaan sosial terhadap penduduk miskin. Pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk memberdayakan atau mengembangkan kelompok, keluarga, perorangan, dan masyarakat yang mengalami beberapa masalah kesejahteraan sosial dalam batas waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pemberdayaan sosial yaitu pemberian bantuan usaha baik secara material maupun nonmaterial. Maka dari itu, upaya pemberdayaan sosial ditujukan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan atau kelompok disabilitas, dan korban bencana.

Dalam upaya untuk mewujudkan harapan di atas, berdasarkan analisis peneliti diperlukan sebuah proses untuk mengembangkan potensi diri manusia. Wadah pengembangan potensi tersebut dapat berupa organisasi. Wadah organisasi tersebut dapat mengasah sekaligus meningkatkan kemampuan kecerdasan kewargaan dan partisipasi sebagai implementasi melalui gerakan sosial. Kecerdasan kewargaan merupakan suatu kemampuan seseorang atau individu untuk mengaktualisasikan peran dirinya secara aktif sebagai warga negara dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi (Sartika et al., 2020). Dalam menghadapi persoalan kehidupan, sikap proaktif yang muncul dapat memberikan dukungan terhadap upaya penekanan angka kemiskinan yang meningkat.

Sebagai bentuk sikap proaktif warga negara yang berpartisipasi dalam organisasi sosial memerlukan pemahaman dimensi kecerdasan kewargaan. Nurmalina & Syaifullah (2008) mengungkapkan bahwa dimensi-dimensi kecerdasan kewargaan terdiri atas cerdas secara intelektual, moral, emosional, dan spiritual. Selain itu, terdapat tujuh nilai kecakapan yang harus dibangun untuk membentuk kecerdasan kewargaan, seperti *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*, *civic commitment*, *civic competence*, dan *civic culture* (Winataputra, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan kewargaan meliputi berbagai kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Lebih khusus bahwa kecerdasan kewargaan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Hal ini sebagai bekal untuk perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) secara konsisten dan berkesinambungan didasari sebuah komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*) dan keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*). Selanjutnya, melalui penampilan kompetensi kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) membentuk suatu nilai-nilai keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) yang dapat berpartisipasi sebagai warga negara (*civic participation*) dengan rasa penuh tanggung jawab (*civic responsibility*). Warga negara yang mampu mengembangkan dimensi dan nilai kecakapan kecerdasan kewargaan merupakan warga negara yang sudah memiliki kesiapan aktif untuk ikut serta dalam partisipasi gerakan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan meminimalisasi permasalahan sosial, seperti kemiskinan.

Penelitian terdahulu dari Masrukhi (2018) mengungkapkan bahwa siswa di tingkat persekolahan dalam pengembangan kecerdasan kewargaannya menunjukkan persentase indikator *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*, *civic commitment*, *civic competence*, *civic culture* dengan perolehan skor dalam kategori rendah yaitu 5.465 dari skor ideal sebesar 12.250. Pada penelitian ini terdapat pengembangan kecerdasan kewargaan berbasis ekstrakurikuler yang melibatkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kecerdasan sosial. Kemudian, pengembangan kecerdasan kewargaan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar dapat dilakukan melalui model integrasi bersama tim guru. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh sekolah menjadi objek penelitian dalam kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri atas bidang seni, olahraga, keagamaan, dan kepemimpinan.

Penelitian lainnya oleh Hildreth (2012) menunjukkan bahwa sekolah diorganisasikan sebagai lembaga kontrol sosial yang memiliki pengaruh pada tindakan demokratis dalam

keterlibatan kaum muda di masyarakat. Kemudian, pengalaman seseorang akan memberikan nilai praktik keterampilan hidup berdemokrasi, berkomunikasi, bermusyawarah, bernegosiasi, dan bergotong royong memecahkan masalah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pendekatan yang komprehensif bertujuan untuk memberikan kesempatan keterlibatan dalam kehidupan kaum muda melalui sekolah, ekstrakurikuler, organisasi masyarakat, olahraga, pekerjaan, pemerintah, asosiasi, dan yayasan. Dalam penelitian lain, Sartika et al., (2020) menunjukkan adanya pengetahuan melalui pengalaman. Para siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan sosialisasi dan pengakuan akan kehadiran orang di sekitar. Selain itu, nilai catur guru sebagai *empowering civic intelligence* dapat menciptakan masyarakat yang memiliki integritas, nasionalis, taat peraturan, dan berbudi pekerti luhur. Hal ini menyimpulkan bahwa kecerdasan kewargaan menjadi kunci keberhasilan tujuan model pembelajaran IPS dan pendidikan nasional dalam penelitiannya.

Nurul Aini & Sapriya (2018) mengungkapkan bahwa penerapan budaya membaca dengan pohon gerakan literasi (pohon *gelis*) dapat meningkatkan pengembangan kompetensi kecerdasan kewargaan dalam aspek kecerdasan intelektual, emosional, dan moral. Di samping itu, media pohon *gelis* mengandung nilai estetis dan kompetitif sebagai sarana pengendalian budaya membaca, serta meningkatkan pengembangan karakter kegemaran membaca, rasa ingin tahu, aktif, kreatif, disiplin, apresiasi penghargaan, dan komunikatif para siswa.

Penelitian lainnya dari Hidayah et al., (2020) menunjukkan bahwa profil kecerdasan kewargaan di tingkat mahasiswa dari berbagai jurusan dalam beberapa dimensi, baik laki-laki maupun perempuan. Kecerdasan kewargaan pada dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial tergolong dalam kategori sedang, sedangkan kecerdasan kewargaan pada dimensi pengetahuan kewarganegaraan, watak kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan tergolong dalam kategori sedang. Penelitian ini menunjukkan rendahnya elemen untuk membangun kecerdasan kewargaan itu sendiri.

Pentingnya penguatan dan pembinaan kecerdasan kewargaan merupakan suatu bentuk harapan dan cita-cita sebagai pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Fraenkel (dalam Sartika et al., 2020) bahwa kecerdasan kewargaan yang berada pada ranah afeksi meliputi harapan dan tujuan yang diutarakan, aspirasi yang diungkapkan, sikap yang ditampilkan, perasaan yang diutamakan, perbuatan yang dilakukan, serta kekhawatiran-kekhawatiran yang diungkapkan oleh seseorang. Demi mengatasi berbagai permasalahan di atas perlu memperhatikan pentingnya suatu wadah organisasi melalui

beberapa gerakan sosial ataupun aktivitas yang memberikan perkembangan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar demi terwujudnya harapan dan tujuan. Maka dari itu, perubahan yang baik di masyarakat memerlukan suatu pengembangan kecerdasan kewargaan sebagai kunci dalam mewujudkan pembentukan warga negara yang cerdas dan partisipatif dalam organisasi untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan Nurmalina & Syaifullah (2008) bahwa warga negara cerdas memiliki peran penting untuk berkiprah secara optimal dalam rangka mengangkat kembali bangsa Indonesia menuju peradaban baru yang lebih modern dan demokratis. Warga negara yang cerdas dapat meningkatkan martabat bangsa dan kompetitif dalam peraturan global saat ini.

Berdasarkan penelitian di atas, kecerdasan kewargaan memerlukan bentuk gerakan sosial yang dilakukan secara aktif untuk membentuk kepribadian yang berkualitas oleh seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama dan memprioritaskan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Hal tersebut selaras dengan pendapat Peterson & Saligman (dalam Gander & Wagner, 2021, hlm. 1) bahwa kepribadian merupakan harapan eksplisit untuk kekuatan karakter yang dapat ditempa. Faktor-faktor seperti pelatihan dan pengalaman belajar yang disengaja melalui peristiwa kehidupan itu penting. Oleh karena itu, melalui pengalaman dan pelatihan gerakan organisasi sosial diharapkan mampu memberikan pengaruh yang cukup baik bagi kepribadian setiap individu.

Gerakan sosial perlu didasari landasan konstitusinya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menjelaskan suatu bentuk jaminan bagi seluruh warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan untuk memenuhi haknya. Oleh sebab itu, setiap individu berhak untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan suatu nilai hak secara bersama-sama untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan analisis peneliti makna dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat salah satunya yaitu membentuk suatu badan usaha lembaga organisasi masyarakat. Maka dari itu, organisasi masyarakat memegang nilai yang sangat penting untuk berperan sebagai pilar demokrasi dalam mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*). Hal ini merupakan bentuk sebuah perjuangan untuk memberikan hak-hak rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang terbentuk oleh beberapa individu atau suatu kelompok yang memiliki kepentingan dan kehendak, serta bertujuan untuk mendukung aktivitas kepentingan publik. Pernyataan di atas sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 tentang keberadaan organisasi masyarakat, yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk

oleh masyarakat secara sukarela atas dasar persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pentingnya pembentukan organisasi masyarakat merupakan bentuk perwujudan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga taraf hidup yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyelesaian permasalahan sosial. Selain itu, organisasi masyarakat atau dalam istilah lainnya sebagai *Non-governmental Organization (NGO)* merupakan peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara (Herdiansah, 2016, hlm. 50).

Salah satu organisasi masyarakat di Indonesia adalah organisasi Benteng Komunitas Sosial di Kota Tangerang. Organisasi Benteng Komunitas Sosial menjadi wadah atau tempat bagi warga negara Indonesia yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kecerdasan kewargaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan memenuhi hak-hak yang harus didapatkan. Organisasi Benteng Komunitas Sosial adalah organisasi yang memfokuskan terhadap pelayanan sosial dalam hal memberi bantuan berupa dana dan kebutuhan pokok rumah tangga dengan sasaran kegiatan, yaitu golongan lanjut usia, pengangguran, dan korban pemutusan hubungan kerja di Kota Tangerang.

Konsep organisasi Benteng Komunitas Sosial selaras dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6 tentang fungsi organisasi masyarakat yang berbunyi: “organisasi masyarakat berfungsi sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dengan nilai-nilai fungsi tersebut keberadaan organisasi Benteng Komunitas Sosial diharapkan mampu melakukan dan membentuk suatu program sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menanggulangi permasalahan sosial. Dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial untuk menanggulangi permasalahan seperti kemiskinan, ketelantaran, dan kaum disabilitas, serta membantu korban bencana memang memerlukan peran masyarakat secara luas, baik secara perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, dan organisasi sosial kemasyarakatan, demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terpadu. Maka dari itu, untuk menjamin terpenuhinya kegiatan sosial

masyarakat harus memiliki tingkat partisipasi dan kecerdasan kewargaan sebagai bekal untuk berkontribusi dalam pencapaian kesejahteraan sosial.

Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan sosial yang harus dilaksanakan yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; (2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan kemampuan kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan (6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan analisis peneliti sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan perlu diketahui bahwa kecerdasan kewargaan pada saat ini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan penduduk melalui gerakan-gerakan peduli dan berbagi kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok, berdasarkan nilai kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerjasama secara gotong royong, dan kekeluargaan yang dibentuk dan dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan. Budimansyah & Suryadi (dalam Gunawan & Wahyudi, 2020, hlm. 129) menjelaskan bahwa warga negara perlu memiliki karakter cerdas. Karakter cerdas yang dimaksud adalah mampu berpikir secara tepat dalam menghadapi setiap persoalan dengan kritis dan sistematis. Oleh karena itu, nilai kecerdasan kewargaan melalui organisasi dapat menjadi suatu nilai potensi yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan *civic community*, salah satunya dengan penerapan pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga domain yang dijelaskan Winataputra (dalam Hubi et al., 2021, hlm. 57), yakni domain kurikuler (PKn sebagai mata pelajaran di sekolah), sosiokultural (PKn yang berkembang di masyarakat yang dimediasi oleh organisasi, media massa, lembaga dan lainnya), dan kajian ilmiah (kegiatan penelitian dan pengembangan program-program PKn). Organisasi sosial yang berada di masyarakat dipandang menjadi bagian suatu pengembangan kewarganegaraan pada domain sosiokultural atau yang dikenal dengan *community civics*. Gerakan *community civics* pada 1970 dipelopori oleh W.A Dunn yang bertujuan untuk menghadapkan pelajar pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional, dan internasional. Gerakan *community civics* disebabkan karena

Ibnu Jamaludin Muslim, 2022

**KAJIAN KECERDASAN KEWARGAAN (CIVIC INTELLIGENCE) DALAM PROGRAM ORGANISASI BENTENG KOMUNITAS SOSIAL DI TANGERANG (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Tata Organisasi Pengurus Benteng Komunitas Sosial Tangerang)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelajaran *civics* atau kewarganegaraan pada saat itu hanya membahas mengenai konstitusi dan pemerintahan sehingga dianggap kurang memperhatikan sudut pandang lingkungan sosial, yaitu masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya komunitas yang baik adalah komunitas yang memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Anggota komunitas memiliki hak dan tugas tertentu, *Community civics* merupakan kajian di bidang kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas, cinta tanah air, berkarakter, kompeten, demokratis, toleran serta mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan (Hubi et al., 2021, hlm. 59). Terdapat keselarasan mengenai partisipasi kegiatan masyarakat yang dijelaskan oleh Jensen (dalam Ludden, 2011, hlm. 1257) bahwa cara untuk terhubung dengan akar keluarga dan budaya untuk dapat mempromosikan kesejahteraan orang lain dari komunitas budaya. Partisipasi ini sering didukung dengan antusias oleh orang tua yang memandang keterlibatan masyarakat sebagai cara bagi komunitas untuk bersatu.

Organisasi dapat berperan sebagai media atau wadah untuk warga negara dalam mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Bankoff (dalam Salim & Dewi, 2018, hlm. 122) berpendapat terkait *community civic* yang memiliki karakteristik yaitu adanya keterlibatan aktif dalam urusan publik, rasa solidaritas kepercayaan dan toleransi yang kuat antaranggota komunitas, kesetaraan yang mengikat orang-orang secara bersama melalui hubungan horizontal yang timbal balik, dan komitmen terhadap kerjasama yang diungkapkan melalui semangat asosiasi lokal akan sosial. Maka dari itu, nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat merupakan dasar dari proses terbentuknya interaksi sosial melalui *community civics* dan pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) sebagai bentuk nilai pengembangan setiap individu.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) perlu dipahami seperti yang dijelaskan oleh Branson (dalam Hidayah et al., 2021, hlm. 495) yaitu keterampilan kewarganegaraan terdiri atas keterampilan intelektual yang mencakup beberapa konsep, yaitu kemampuan mengidentifikasi (mengenali dan menafsirkan sesuatu yang nyata seperti nilai-nilai dan cita-cita), mengidentifikasi dan menangkap bahasa dan simbol-simbol emosional, dan mendeskripsikan, seperti mengidentifikasi objek, proses, institusi, fungsi, tujuan, alat, dan kualitas yang jelas atau tidak jelas melalui laporan tertulis dan lisan. Selain itu, ditambahkan oleh Winarno (2014) bahwa keterampilan kewarganegaraan memiliki beberapa kemampuan, seperti keterampilan intelektual, misalnya, kemampuan menjelaskan dan menganalisis, mengidentifikasi, mendeskripsikan,

mengklarifikasi sesuatu dan kemampuan seseorang untuk membedakan fakta dan pendapat, maksud dan tujuan, kemampuan untuk mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi, seperti menilai masalah yang ada, dan kemampuan mendiskusikan penilaian dalam ranah privat dan publik.

Organisasi masyarakat yang diidentifikasi oleh Verba, Lehman Schlozman, dan Brady (dalam Brunell, 2013, hlm. 20) siswa mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif seperti berbicara di depan umum, berunding, bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan, dan kompromi. Model tersebut mengidentifikasi tiga jenis keterampilan kewarganegaraan keterampilan berbasis sumber daya (waktu dan uang) yaitu kemampuan berkomunikasi seperti berbicara dengan teman atau keluarga tentang masalah politik, membuat presentasi atau berbicara di depan umum, menulis surat atau bentuk lain dengan menghubungi pejabat publik dan keterampilan berorganisasi dan kewarganegaraan seperti membentuk kepanitiaan, memimpin rapat, menghadiri rapat, mencari informasi politik, dll.

Stoneman (dalam Nicotera et al., 2013, hlm. 63) menyatakan bahwa keterampilan kewarganegaraan dan minat kewarganegaraan seorang pemuda dipicu ketika mereka memiliki pengalaman langsung dalam memastikan masalah yang memengaruhi komunitas, menciptakan tindakan untuk mengatasi masalah, mengembangkan proyek untuk mengatasinya, dan mengimplementasikan solusi mereka melalui kolaborasi dengan orang lain. Nilai-nilai tersebut seringkali mengatur bagaimana individu bertindak dan bertingkah laku dalam suatu nilai tatanan masyarakat. Selain itu, nilai keterampilan sosial menjadi suatu dasar acuan dalam menjalankan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas dan menumbuhkan nilai gotong royong, peduli, dan rasa setia kawan dalam kehidupan sosial sebagai bentuk partisipasi terhadap masyarakat secara suka rela.

Sikap keikutsertaan dalam organisasi berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan sebagai suatu sikap menjadi sukarelawan (*volunteer*) yang tidak mementingkan keuntungan material, melainkan pengembangan sikap individu pada pengalaman. Sehubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian oleh Larson Nippolt et.'al (dalam Worker et al., 2020, hlm. 10) mengungkapkan bahwa menjadi sukarelawan dalam program *Youth Deveplopment* memberikan peluang untuk pertumbuhan individu, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan koneksi komunitas, mempelajari materi pelajaran baru, dan membangun modal sosial dengan komunitas mereka. Maka dari itu, dalam penelitian tersebut terdapat perubahan pertumbuhan pribadi individu yang memberikan hubungan konektivitas antarindividu yang lain

sebagai modal sosial mereka di masyarakat.

Wilson (dalam Worker et al., 2020, hlm. 8) memberikan kesimpulan yang menunjukkan kesukarelaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dapat memberikan banyak manfaat. Pertama, mempromosikan praktik kewarganegaraan yang baik, seperti kemampuan untuk mengatur pertemuan dan meningkatkan kepercayaan sosial. Kedua, mengurangi perilaku antisosial hingga tingkat yang sederhana dan membangun keterampilan interpersonal, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Ketiga, menyadari manfaat kesehatan fisik dan mengurangi kematian karena integrasi sosial dan dukungan sosial, terutama untuk orang dewasa yang lebih tua. Keempat, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan dengan memperkuat integrasi sosial, menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan kemandirian diri, dan meningkatkan rasa agen. Kelima, melihat manfaat positif untuk pencapaian pekerjaan saat relawan mengembangkan hubungan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, ditunjukkan bahwa adanya hubungan antara kecerdasan kewargaan sebagai pondasi awal untuk mengembangkan nilai dalam kepercayaan diri, keterampilan, hubungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan individu dalam organisasi sosial. Hal itu membuat peneliti tertarik untuk meneliti kegiatan pembinaan kewargaan dalam organisasi Benteng Komunitas Sosial di Tangerang yang memiliki fokus tujuan sebagai organisasi yang dapat mewujudkan dan menyelesaikan beberapa permasalahan sosial. Maka dari itu, peneliti merumuskan penelitian berjudul “Kajian Kecerdasan Kewargaan (*Civic Intelligence*) dalam Program Organisasi Benteng Komunitas Sosial di Tangerang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti merumuskan rumusan masalah pokok penelitian, yaitu bagaimana proses pembinaan kecerdasan kewargaan melalui kegiatan organisasi Benteng Komunitas sosial. Adapun beberapa pertanyaan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana bentuk pengembangan organisasi Benteng Komunitas Sosial melalui gerakan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan pembinaan *civic intelligence*?
- 2) Bagaimana implementasi gerakan sosial melalui praktik *volutarisme* untuk meningkatkan *civic intelligence* dalam organisasi Benteng Komunitas Sosial?
- 3) Hambatan apa saja yang didapatkan dalam mengimplementasikan pembinaan *civic intelligence* dalam organisasi benteng komunitas sosial?

- 4) Bagaimana upaya organisasi Benteng Komunitas Sosial untuk mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan gerakan kemanusiaan sebagai perwujudan pembinaan *civic intelligence*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi kewargaan terhadap gerakan sosial. Fokus kajian tersebut adalah proses pembinaan kecerdasan kewargaan pada bidang kemasyarakatan termasuk di dalamnya upaya penyelesaian berbagai masalah sosial dalam organisasi.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- 1) Mengeksplorasi bentuk kompetensi organisasi Benteng Komunitas Sosial melalui gerakan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan pembinaan *civic intelligence*;
- 2) Mendeskripsikan implementasi gerakan sosial melalui praktik *volutarisme* untuk meningkatkan *civic intelligence* dalam organisasi Benteng Komunitas Sosial;
- 3) Menemukan hambatan apa saja yang didapatkan dalam mengimplementasikan pembinaan *civic intelligence* dalam organisasi Benteng Komunitas Sosial;
- 4) Mengelaborasi upaya organisasi Benteng Komunitas Sosial dalam mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan gerakan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan pembinaan *civic intelligence*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berupaya memahami konsep kecerdasan kewargaan dengan pembinaan masyarakat melalui organisasi Benteng Komunitas Sosial. Studi penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah masalah sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, baik dari segi konsep teoritis maupun praktis, serta manfaat bagi kebijakan ataupun aksi sosial.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan Pendidikan

Kewarganegaraan (Pkn) pada domain sosiokultural secara teoritis yang terdiri dari:

- 1) Informasi pengembangan penelitian ini yaitu dari teori mengenai kecerdasan kewargaan dalam masyarakat yang terkonstruksi dari gerakan organisasi sosial yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dan sarana informasi secara konseptual bagi dunia pendidikan;
- 2) Secara khusus penelitian ini mengawali kajian mekanisme implementasi pembinaan kecerdasan kewargaan dalam organisasi sosial Benteng Komunitas Sosial sebagai perwujudan *community civic*;
- 3) Melengkapi hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema pembinaan kecerdasan kewargaan melalui kegiatan organisasi Benteng Komunitas Sosial sehingga dapat menjadi bahan referensi dan memperkuat khasanah keilmuan Pkn.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain peneliti selanjutnya, masyarakat, dan pembaca umum.

##### **1.4.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya. Khususnya, penelitian yang akan lebih dalam mengkaji kepentingan masyarakat agar lebih aktif untuk berpartisipasi berorganisasi sebagai perwujudan nilai dasar kecerdasan kewargaan dan upaya untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berorganisasi.

##### **1.4.2.1 Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pemacu kepedulian masyarakat terhadap keikutsertaan masyarakat dalam berorganisasi yang dapat meningkat sehingga mampu menjadikan warga negara yang memiliki nilai kecerdasan kewargaan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan.

##### **1.4.2.2 Bagi Pembaca**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah untuk memperluas wawasan dan referensi tentang persepsi masyarakat dalam partisipasi berorganisasi, perwujudan nilai kecerdasan warga negara, dan upaya dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial.

#### **1.4.3 Manfaat dari Segi Kebijakan**

- 1) Membantu menyosialisasikan upaya yuridis pemerintah berupa peraturan dan UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 tentang Keberadaan Organisasi, UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6 tentang Fungsi Organisasi Masyarakat, dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan Dasar Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Sosial;

Ibnu Jamaludin Muslim, 2022

**KAJIAN KECERDASAN KEWARGAAN (CIVIC INTELLIGENCE) DALAM PROGRAM ORGANISASI BENTENG KOMUNITAS SOSIAL DI TANGERANG (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Tata Organisasi Pengurus Benteng Komunitas Sosial Tangerang)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan organisasi sosial;
- 3) Sebagai bahan evaluasi pemerintah dan warga masyarakat sekitar dalam kontribusi terhadap masyarakat secara meluas dengan didasari nilai-nilai kecerdasan kewargaan sebagai bekal perwujudan implementasi gerakan sosial.

#### **1.4.4 Manfaat dari Segi Aksi Sosial**

Hasil penelitian ini bermanfaat menjadi nilai yang dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap peningkatan karakter, kecerdasan kewargaan dalam berpartisipasi melalui organisasi sosial dapat menjadi perhatian dan percontohan bagi ruang lingkup masyarakat wilayah lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial.

### **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Struktur organisasi tesis merupakan suatu rangkaian sistematika penulisan yang memberikan suatu gambaran dari setiap isi bab dan urutan dalam penulisannya. Dengan adanya struktur organisasi diharapkan pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini yang berjudul “Kajian Kecerdasan Kewargaan (*Civic Intelligence*) Dalam Program Organisasi Benteng Komunitas Sosial Di (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Tata Organisasi Pengurus Benteng Komunitas Sosial Tangerang)” rangkaian bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.5.1 Bab I Pendahuluan**

Bab kesatu yaitu pendahuluan dalam menguraikan permasalahan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

#### **1.5.2 Bab II Kajian Pustaka**

Bab kedua yaitu kajian pustaka. Bab ini berisi teori-teori yang membangun penelitian penulis sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Teori yang dikembangkan pada penelitian ini terdiri dari kecerdasan, kecerdasan kewargaan, organisasi dan gerakan sosial, *community civics*, *civics skill*, organisasi sosial sebagai pembinaan kecerdasan kewargaan, keterlibatan warga negara dalam organisasi, dan tinjauan tentang *voluntarisme*.

#### **1.5.1 Bab III Metode Penelitian**

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, desain penelitian, subjek atau partisipan dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan

data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data. Desain pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya yaitu ketua, wakil, anggota pengurus, masyarakat, dan relawan sosial organisasi Benteng Komunitas Sosial. Lokasi penelitian ini adalah Sekretariat Benteng Komunitas Sosial, Jl. Utama No.58, RT.04/RW04, Mekarsari, Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan instrumen observasi, wawancara, dan analisis dokumen, Selain itu, analisis data pada penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*), serta validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan informasi subjek penelitian.

### **1.5.2 Bab IV Temuan dan Pembahasan**

Bab keempat yaitu temuan dan pembahasan. Bab ini diuraikan konsep tentang temuan penelitian berupa gambaran umum profil organisasi dan lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

### **1.5.3 Bab V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Bab kelima yaitu kesimpulan. Bab ini berisi uraian mengenai pokok-pokok kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.